

ABSTRAK

Faizal Wahyu Mashuri, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Peracikan dan Peredaran Bahan Peledak Jenis Petasan Tanpa Izin Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 64/pid.sus/2024/pn png)*. Skripsi. Program Studi Hukum, FH, Universitas PGRI Madiun Pembimbing (I) Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H. (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.

Maraknya peracikan dan peredaran petasan ilegal di Indonesia menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa dan ketertiban masyarakat, yang semakin diperparah oleh kemudahan akses bahan baku melalui *e-commerce* dan tersedianya tutorial peracikan di media digital. Penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi peracikan dan peredaran bahan peledak jenis petasan di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut perspektif hukum pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif deskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png sebagai objek kajian utama. Hasil penelitian menunjukkan regulasi Indonesia tersusun berlapis, berpusat pada UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, diperkuat KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008, dan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017. Terdapat dua celah regulasi yang belum terjangkau: peredaran bahan prekursor melalui *e-commerce* dan penjualan via media sosial yang berada di luar jangkauan pengawasan. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* dengan mensyaratkan terpenuhinya *actus reus* dan *mens rea* secara integral. Majelis hakim menjatuhkan pidana 6 bulan kepada terdakwa berusia 19 tahun, jauh di bawah ancaman maksimal, dengan mempertimbangkan usia, motif ekonomi sederhana, sikap kooperatif, dan belum adanya korban nyata.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, bahan peledak, petasan, hukum pidana Indonesia

ABSTRACT

Faizal Wahyu Mashuri, *Criminal Liability for Perpetrators of Compounding and Distributing Explosives of Firecrackers Without a License in the Perspective of Indonesian Criminal Law (Study of Decision Number 64/pid.sus/2024/pn png)*. Thesis. Law Study Program, FH, University of PGRI Madiun Supervisor (I) Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H. (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.

The widespread unlicensed compounding and distribution of firecrackers in Indonesia poses a serious threat to public safety and social order, exacerbated by the ease of obtaining raw materials through *e-commerce* and the free availability of compounding tutorials on digital media. This study aims to examine: (1) the regulatory framework governing firecracker explosive compounding and distribution in Indonesia; and (2) the criminal liability of perpetrators under Indonesian criminal law. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, applying both a statutory approach and a case approach using Ponorogo District Court Judgment No. 64/Pid.Sus/2024/PN Png as the primary object of analysis. The findings indicate that Indonesia's regulatory framework is structured in multiple layers, centered on Emergency Law No. 12 of 1951, reinforced by the Criminal Code, Law No. 1 of 2023, National Police Regulation No. 2 of 2008, and National Police Regulation No. 17 of 2017. Two regulatory gaps remain unaddressed: the distribution of precursor materials through *e-commerce* and sales via social media channels outside any authority's supervisory jurisdiction. Criminal liability is grounded in the principle of *geen straf zonder schuld*, requiring the integral fulfillment of *actus reus* and *mens rea*. The court sentenced the 19-year-old defendant to 6 months' imprisonment, well below the statutory maximum, considering the defendant's age, simple economic motive, cooperative conduct, and the absence of actual victims.

Keywords: criminal liability, explosives, firecrackers, Indonesian criminal law